PERANAN PATEN DALAM BIDANG INDUSTRI

RIKI ARINATA

165100117P, 785567972

Fakultas Komputer

Rikiarinata.student@umitra.ac.id

Abstract

ABSTRAK Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak pada seseorang atau organisasi atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual serta memberikan hak kepada pemilik untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam praktek dapat berwujud penemuan di bidang teknologi atau ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, dan sebagainya. Paten merupakan salah satu jenis dari HKI. Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu unit kerja di bawah Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. Salah satu fungsinya ialah memfasilitasi dan mengkomersialisasikan HKI di balai-balai litbang industri. Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi peneliti balai litbang industri memahami dan menerapkan paten, pada tahun 2010 telah dilakukan survey dengan mengambil sampel 42 (empat puluh dua) responden yang mewakili balai-balai litbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden umumnya sudah mengenal paten, namun pemahaman teknis akan jangka perlindungan paten dan kriteria invensi yang dapat memperoleh paten masih relatif kurang. Penguasaan responden terhadap informasi paten dan public domain relatif sedang, tetapi masih memerlukan bimbingan dan akses yang lebih luas tentang manfaat informasi paten. Informasi paten belum dimanfaatkan secara maksimal, hanya sebagian kecil responden yang memanfaatkan informasi paten sebagai inspirasi dalam melakukan litbang. Yang paling banyak dimanfaatkan adalah IPDL (situs jaringan DJHKI). Sebagian peneliti melakukan penelitian atas dasar tugas atasan dan dalam rangka memenuhi angka kredit peneliti, belum menunjukkan keseriusan untuk menghasilkan sesuatu invensi yang baru dan mengandung unsur inventif. Hampir semua responden percaya bahwa pemanfaatan informasi paten memerlukan dukungan pemerintah utamanya berupa penyelenggaraan pelatihan penelusuran paten. Kata

kunci: paten, peneliti, balai litbang industri, kebijakan.

A. INTRODUCTION

Hak paten

A. Pengertian Hak Paten

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya, adalah kepemilikan, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh inventor baik secara perseorang atau badan yang telah berjasa dalam menemukan dan menciptakan invensi dan diakui secara hukum dan mendapatkan perlindungan hukum.

B. Hak Paten Pengertian Dalam Undang – undang

Dalam UU no 14 tahun 2001 pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor sebagai penghargaan atas hasil invensinya dalam bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu untuk mengatur dan menggunakan hasil invensinya. Hak paten berbeda dengan hak cipta, dalam

hak cipta seseorang diperbolehkan untuk menciptakan karya yang mempunyai fungsi dengan karya orang lain asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang telah memiliki hak cipta.

Sedangkan dalam hak paten, seseorang dilarang untuk membuat karya yang cara kerjanya sama dengan karya yang telah memiliki hak paten.

C. Fungsi Hak Paten

Fungsi Hak ditegaskan kalau menurut UU paten No.13 tahun 1997, hak paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk memberikan, dan ada beberapa yaitu:

1. Memberikan Perlindungan Hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten.
2. Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri,

3. Memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya.

4. Sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut.

4. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;

5. Invensi metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan kepada manusia dan/atau hewan;

- Kreasi estetika;
- Skema;
- Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan mental, permainan, bisnis;
- Aturan dan metode mengenai program komputer;
- Presentasi mengenai suatu informasi

- Manfaat dari hak paten itu sendiri:

1. Hak eksklusif
2. Kepastian hukum
3. Insentif terhadap suatu kreasi teknologi
4. Posisi pasar yang kuat
5. Meningkatkan daya saing
6. Kesempatan lisensi
7. Mendorong investasi

(FDI)

8. Katalis transfer teknologi

9. Strategi perencanaan perdagangan dan industry

- dan ada beberapa yang tidak dapat diberi hak paten

1. Invensi proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;

2. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;

3. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis mikrobiologis atau proses mikrobiologis.

D. Contoh kasus Hak Paten

Motor Bajaj melintasi jalanan Jakarta. Iklannya pun wara-wiri di berbagai media. Namun siapa sangka, hak paten teknologi mesin motor kebanggaan masyarakat India ini menjadi masalah di Indonesia.

Bajaj Auto Limited sebagai produsen motor Bajaj menggugat Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Sebab, permohonan paten untuk sistem mesin pembakaran dalam dengan prinsip empat langkah ditolak dengan alasan sudah dipatenkan terlebih dahulu oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha. Kasus tersebut bermula ketika Ditjen Haki menolak permohonan pendaftaran paten Bajaj pada 30 Desember 2009 dengan alasan ketidakbaruan dan tidak mengandung langkah inventif. Atas penolakan tersebut, Bajaj Auto mengajukan banding ke Komisi Banding Paten. Namun Komisi Banding dalam putusannya

pada 27 Desember 2010 sependapat dengan Direktorat Paten sehingga kembali menolak pendaftaran paten tersebut. Ditjen HAKI punya catatan tersendiri sehingga menolak permohonan paten ini yaitu, sistem ini telah dipatenkan di Amerika Serikat atas nama Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha dengan penemu Minoru Matsuda pada 1985. Lantas oleh Honda didaftarkan di Indonesia pada 28 April 2006. Namun dalih ini dimentahkan oleh Bajaj. Bajaj merupakan perusahaan yang berdiri sejak 1926. Perusahaan ini bergerak di berbagai sektor industri seperti kendaraan roda dua, kendaraan roda tiga dengan berbasis pada ilmu pengetahuan yang telah beroperasi dilebih dari 50 negara antara lain Amerika Latin dan Afrika.

B. CONTENT

Pada era sekarang ini di mana industri kian berkembang dan kompetisi dagang antar industri yang menghasilkan produk serupa semakin tinggi, di situ kita setuju dengan istilah “*may the best wins*” (hanya yang terbaiklah yang akan unggul). Salah satu bukti bahwa suatu produk merupakan yg terbaik di bidangnya adalah dengan adanya pengakuan dari masyarakat atau kualitas suatu barang atau jasa tertentu atau “*brand recognition*”. Pengakuan ini tidaklah semata-mata timbul, namun harus melalui proses

panjang yang merupakan suatu kerja keras dari para *stakeholder* dengan berbagai strategi yang mereka miliki dengan disertai bukti berupa hasil nyata yang dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

Strategi-strategi tersebut di antaranya meliputi inovasi-inovasi di bidang teknologi dalam menciptakan suatu inovasi produk, yaitu menciptakan produk yang belum pernah ada sebelumnya atau melengkapi / menyempurnakan produk yang telah ada. Inovasi sebagai sebuah strategi tersebut merupakan buah pemikiran atau bisa disebut sebagai suatu karya intelektual yang merupakan kekayaan intelektual (*intellectual property*) atau biasa disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual / HKI (*Intellectual Property Right*) yang harus dilindungi.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tidak lepas dari adanya upaya dari Pemerintah dalam menjamin perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tersebut melalui perangkat hukum yang kuat, di antaranya terdapat Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selain itu terdapat pula Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang Rahasia Dagang ; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ; Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta. Kuat di sini dalam

arti memiliki “daya paksa” berupa sanksi pidana maupun perdata terhadap suatu pelanggaran. Kepastian hukum yang menjamin perlindungan atas aset-aset kekayaan intelektual akan merangsang industri-industri untuk terus mengembangkan diri melalui inovasi-inovasinya yang tentunya akan meramaikan pasar industri lokal dalam negeri untuk bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.

Walaupun kita setuju bahwa suatu kreasi berupa penemuan / invensi yang berasal dari daya pikir manusia adalah tidak terbatas, dalam tema perlindungan HKI ini justru jelas-jelas terdapat batasan-batasan yang tegas antara suatu pengembangan dari teknologi atau karya cipta sebelumnya dengan penjiplakan. Hal ini yang sering dijadikan dalih bagi suatu industri, yaitu dengan alasan bahwa produk miliknya tersebut merupakan hasil pengembangan dari kekayaan intelektual yang ada sebelumnya – padahal bukan ; atau beralasan dengan itikad baik - padahal sebenarnya

terdapat *intention* (niat) atau “*bad faith*” yang sangat jelas di sini yaitu untuk mendompleng ketenaran suatu merek, karya cipta atau teknologi pihak lain untuk keuntungan bisnisnya. Pelaku-pelaku tersebut tidak memikirkan atau mempedulikan akibat lebih jauh dari perbuatan curang yang mereka lakukan, yang mana hal itu sangat merugikan para pemilik / pemegang HKI sebenarnya. Lebih buruk lagi, masyarakat dalam hal ini

pasar akan mengasosiasikan suatu produk hasil duplikasi tersebut dengan produk-produk ASLI yang sudah ada sebelumnya.

Tidak ada hal baik yang akan terjadi dalam perkara duplikasi ini. Jika suatu hasil duplikasi tersebut mempunyai kualitas baik, maka dia tetap mendompleng reputasi atau ketenaran produk sebelumnya, namun jika ternyata karya dupikasi tersebut mempunyai kualitas atau hasil yang buruk, bahkan hingga dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia, misalnya, maka hal tersebut dapat menghancurkan reputasi baik dari industri jujur yang dimiliki oleh pemilik HKI sebenarnya. Akibatnya bisnis dan kepercayaan masyarakat yang telah dibangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun menjadi hancur begitu saja karena ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini lah yang membuat lesunya industri kreatif dalam negeri, sebab dalam benak kalangan tertentu tertanam bahwa percuma membuat sesuatu yang baru karena hanya akan dengan mudahnya dijiplak atau dibajak; juga terhadap karyanya tersebut tidak mendapatkan “penghargaan” yang berarti.

Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas, maka di sinilah peran Konsultan HKI dalam suatu alur bisnis sebuah industri sejak tahap awal, yaitu sejak perencanaan suatu produk hingga diluncurkannya produk tersebut ke pasar. Mengingat dalam suatu industri bukan hanya dibutuhkan orang-

orang kreatif yang hanya dapat dituntut untuk menemukan ide-ide atau hal-hal baru dalam hal produk, namun juga sangat mutlak dibutuhkan strategi yang baik untuk melindungi seluruh aset-aset karya intelektual berupa ide atau inovasi yang merupakan kunci sukses suatu perusahaan.

Adalah persepsi yang keliru bila menganggap peran Konsultan HKI adalah hanya sebagai *tools* atau sarana untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual atau lisensi yang dimilikinya. Justru sebaliknya, peran Konsultan HKI dibutuhkan alur bisnis sebuah industri sejak awal, yaitu sejak tahap perencanaan suatu produk hingga diluncurkannya produk tersebut ke pasar. Adanya persepsi keliru ditambah minimnya pemahaman sekaligus kesadaran akan perlindungan hak kekayaan intelektual membuat maraknya aksi-aksi pembajakan sebagai sebuah perbuatan curang yang melanggar hukum, namun yang bersangkutan tidak dapat berbuat banyak karena hak kekayaan intelektualnya tersebut tidak diajukan permohonan perlindungannya.

Dalam bidang Paten, ketika seseorang berhasil menemukan sebuah teknologi mesin terbaru misalnya, Konsultan HKI akan memastikan bahwa teknologi tersebut merupakan suatu penemuan terbaru; mendaftarkan paten tersebut dan mengawal seluruh proses hingga dikabulkannya; juga memastikan tidak ada pihak lain yang akan “mengganggu” paten tersebut. Di bidang paten ini seorang Konsultan HKI harus dapat

melakukan “*freedom to operate (FTO)*” atau *clearance search* untuk suatu paten. Maksudnya adalah untuk melakukan pencarian atau penelusuran pelanggaran, terhadap paten-paten yang diterbitkan atau tertunda aplikasi patennya. FTO ini berguna untuk menentukan apakah suatu produk atau proses dapat melanggar hak klaim dari paten yang diterbitkan atau tertunda paten aplikasi. FTO juga dapat mencari data-data paten yang sudah kadaluwarsa atau sudah menjadi *public domain* yang memungkinkan produk atau proses dalam suatu paten untuk digunakan. FTO harus diikuti dengan pendapat hukum (*legal opinion*) mengenai apakah suatu produk atau proses yang diberikan pada paten tersebut melanggar klaim dari satu atau lebih paten-paten yang telah dikabulkan (*granted*) atau yang masih dalam proses aplikasi atau *pending*.

Dalam bidang Merek, Konsultan HKI akan memberikan masukan dengan salah satunya menyarankan untuk melakukan “penelusuran” (*search*) untuk merek yang bersangkutan, sehingga dapat diketahui apakah sudah terdapat merek-merek serupa untuk kelas barang/jasa yang sama sebelumnya; mengawal seluruh proses pendaftaran merek tersebut dan menjaga keberlakuan merek tersebut serta menghadapi gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan merek tersebut.

Konsultan HKI yang baik harus dapat memberikan advis yang jujur mengenai kekayaan intelektual dari pemohon. Seorang Konsultan HKI harus dapat memberikan pendapat mengenai “valuation” atau nilai-nilai suatu HKI, apakah layak atau tidak untuk diperpanjang proteksinya; dapat memberikan pendapat mengenai kemungkinan berhasilnya suatu kekayaan intelektual untuk didaftarkan berdasarkan penemuan kekayaan intelektual yang telah ada sebelumnya. Sepanjang jangka waktu perlindungan suatu kekayaan intelektual yang dipercayakan kepadanya, sepanjang itu pula lah tanggung jawab seorang konsultan HKI tersebut terus mengikuti, kecuali jika ada pengalihan kuasa.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual: Konsultan HKI adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal. Konsultan HKI sebagaimana dimaksud dalam artikel ini adalah Konsultan HKI Terdaftar, yaitu orang yang telah melalui pendidikan khusus dan dilantik dengan diambil sumpah oleh Menteri Hukum dan HAM, serta terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Kemudian Pasal 3 huruf f mengatur : Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan HKI, pemohon harus memenuhi syarat lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) menentukan : Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal dan ayat (2) : Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal termaksud adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Siapa saja yang bisa menjadi Konsultan HKI? Apakah melulu dari mereka yang berlatar belakang pendidikan Hukum sebagai seorang Sarjana Hukum? Pada akhirnya, kita dapati bahwa profesi konsultan HKI bisa berasal dari berbagai disiplin ilmu. Bagaimana bisa demikian? Hal tersebut dikarenakan tanggung jawab yang harus dapat dilakukannya sebagai konsultan yang menangani berbagai bidang yang terkait dengan teknologi mutakhir, industri, perdagangan bahkan seni sekalipun. Maka dari itu akan sangat sempurna bila seorang konsultan HKI dapat mempunyai latar belakang dari bidang Hukum dan juga dari bidang lain seperti teknik atau lainnya, karena *basic knowledge* yang diperoleh dari disiplin-disiplin ilmu tersebut dapat mendukung keprofesionalannya sebagai seorang konsultan HKI. Atau dapat juga suatu kantor Konsultan HKI

diperkuat dengan tim yang terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda dan spesifik, agar dapat melayani secara optimal berbagai pertanyaan atau permasalahan yang diajukan oleh klien / pemohon, juga untuk menangani perkara-perkara yang spesifik pula terkait penemuan (Paten) dalam bidang teknologi.

Artikel ini dibuat sebagai informasi sekaligus untuk menumbuhkan kesadaran para pihak yang terkait maupun terlibat langsung dalam suatu bisnis atau industri, bahwa sudah saatnya untuk mulai melibatkan peran jasa Konsultan HKI dalam suatu perencanaan bisnisnya. Hal tersebut berguna untuk mengawal setiap aset yang dimiliki berupa Hak Kekayaan Intelektual sejak awal ditemukan lalu didaftarkan hingga dikabulkannya, bahkan selama obyek perlindungan tersebut masih ada, untuk menjaganya dari segala kemungkinan akan adanya gangguan dari pihak lain.

Penulis adalah seorang Konsultan HKI Terdaftar, Founder dan Partner dari Kantor Konsultan HKI HarvesPat Intellectual Property Services yang memiliki wilayah kerja dalam lingkup internasional dengan bekerjasama dengan para Partner dan Associate di berbagai negara.

C. CONCLUSION

Fungsi Hak ditegaskan kalau menurut UU paten No.13 tahun 1997, hak paten adalah hak

husus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk memberikan, dan ada beberapa yaitu:

1. Memberikan Perlindungan Hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten.

2. Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri,

3. Memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya.

4. Sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Hak Paten Pengertian Dalam Undang – undang Dalam UU no 14 tahun 2001 pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa hak

paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor sebagai penghargaan atas hasil

invensinya dalam bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu untuk mengatur dan menggunakan hasil invensinya. Hak paten berbeda dengan hak cipta, dalam hak cipta seseorang diperbolehkan untuk menciptakan karya yang mempunyai fungsi dengan karya orang lain asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang telah memiliki hak cipta. Sedangkan dalam hak paten, seseorang dilarang untuk membuat karya yang cara kerjanya sama dengan karya yang telah memiliki hak paten.

D. DISCUSSION

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan intelektual tidak lepas dari adanya upaya dari Pemerintah dalam menjamin perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tersebut melalui perangkat hukum yang kuat, di antaranya terdapat Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selain itu terdapat pula Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang Rahasia Dagang ; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ; Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta. Kuat di sini dalam arti memiliki “daya paksa” berupa sanksi pidana maupun perdata terhadap suatu pelanggaran. Kepastian

hukum yang menjamin perlindungan atas aset-aset kekayaan intelektual akan merangsang industri-industri untuk terus mengembangkan diri melalui inovasi-inovasinya yang tentunya akan meramaikan pasar industri lokal dalam negeri untuk bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Walaupun kita setuju bahwa suatu kreasi berupa penemuan / invensi yang berasal dari daya pikir manusia adalah tidak terbatas, dalam tema perlindungan HKI ini justru jelas-jelas terdapat batasan-batasan yang tegas antara suatu pengembangan dari teknologi atau karya cipta sebelumnya dengan penjiplakan.

E. REFERENCE

- [1] O. M. Febriani and A. S. Putra, “Sistem Informasi Monitoring Inventori Barang Pada Balai Riset Standardisasi Industri Bandar Lampung,” *J. Inform.*, vol. 13, no. 1, pp. 90–98, 2014.
- [2] A. S. Putra, “Paperplain: Execution Fundamental Create Application With Borland Delphi 7.0 University Of Mitra Indonesia,” 2018.
- [3] A. S. Putra, “2018 Artikel Struktur Data, Audit Dan Jaringan Komputer,” 2018.
- [4] A. S. Putra, “ALIAS MANAGER USED IN DATABASE DESKTOP STUDI CASE DB DEMOS.”
- [5] A. S. Putra, “COMPREHENSIVE SET OF

- PROFESSIONAL FOR
DISTRIBUTE COMPUTING.”
- [6] A. S. Putra, “DATA
ORIENTED RECOGNITION
IN BORLAND DELPHI 7.0.”
- [7] A. S. Putra, “EMBARCADERO
DELPHI XE 2 IN GPU-
POWERED FIREMONKEY
APPLICATION.”
- [8] A. S. Putra, “HAK ATAS
KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM DUNIA
TEKNOLOGY BERBASIS
REVOLUSI INDUSTRI 4.0.”
- [9] A. S. Putra, “IMPLEMENTASI
PERATURAN
PERUNDANGAN UU. NO 31
TAHUN 2000 TENTANG
DESAIN INDUSTRI
BERBASIS INFORMATION
TECHNOLOGY.”
- [10] A. S. Putra,
“IMPLEMENTATION OF
PARADOX DBASE.”
- [11] A. S. Putra,
“IMPLEMENTATION OF
TRADE SECRET CASE
STUDY SAMSUNG MOBILE
PHONE.”
- [12] A. S. Putra,
“IMPLEMENTATION
PATENT FOR APPLICATION
WEB BASED CASE STUDI
WWW. PUBLIKLAMPUNG.
COM.”
- [13] A. S. Putra,
“IMPLEMENTATION
SYSTEM FIRST TO INVENT
IN DIGITALLY INDUSTRY.”
- [14] A. S. Putra, “MANUAL
REPORT & INTEGRATED
DEVELOPMENT
ENVIRONMENT BORLAND
DELPHI 7.0.”
- [15] A. S. Putra, “PATENT AS
RELEVAN SUPPORT
RESEARCH.”
- [16] A. S. Putra, “PATENT FOR
RESEARCH STUDY CASE
OF APPLE. Inc.”
- [17] A. S. Putra, “PATENT
PROTECTION FOR
APPLICATION INVENT.”
- [18] A. S. Putra, “QUICK REPORT
IN PROPERTY
PROGRAMMING.”
- [19] A. S. Putra, “REVIEW
CIRCUIT LAYOUT
COMPONENT
REQUIREMENT ON ASUS
NOTEBOOK.”
- [20] A. S. Putra, “REVIEW
TRADEMARK PATENT FOR
INDUSTRIAL
TECHNOLOGY BASED 4.0.”
- [21] A. S. Putra, “TOOLBAR
COMPONENT PALLETTE IN
OBJECT ORIENTED
PROGRAMMING.”
- [22] A. S. Putra, “WORKING
DIRECTORY SET FOR
PARADOX 7.”
- [23] A. S. Putra, “ZQUERY
CONNECTION
IMPLEMENTED
PROGRAMMING STUDI
CASE PT. BANK BCA Tbk.”
- [24] A. S. Putra, D. R. Aryanti, and
I. Hartati, “Metode SAW
(Simple Additive Weighting)
sebagai Sistem Pendukung
Keputusan Guru Berprestasi
(Studi Kasus: SMK Global
Surya),” in *Prosiding Seminar
Nasional Darmajaya*, 2018, vol.
1, no. 1, pp. 85–97.
- [25] A. S. Putra and O. M. Febriani,
“Knowledge Management
Online Application in PDAM
Lampung Province,” in

Prosiding International conference on Information Technology and Business (ICITB), 2018, pp. 181–187.

- [26] A. S. Putra, O. M. Febriani, and B. Bachry, “Implementasi Genetic Fuzzy System Untuk Mengidentifikasi Hasil Curian Kendaraan Bermotor Di Polda Lampung,” *SIMADA (Jurnal Sist. Inf. dan Manaj. Basis Data)*, vol. 1, no. 1, pp. 21–30, 2018.
- [27] A. S. Putra, H. Sukri, and K. Zuhri, “Sistem Monitoring Realtime Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Dengan Konsep Jaringan Sensor Nirkabel,” *IJEIS (Indonesian J. Electron. Instrum. Syst.)*, vol. 8, no. 2, pp. 221–232.
- [28] D. P. Sari, O. M. Febriani, and A. S. Putra, “Perancangan Sistem Informasi SDM Berprestasi pada SD Global Surya,” in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 289–294.